



Komitmen dan Inovasi Pimpinan Daerah **DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI MASA PANDEMI**

FORUM NASIONAL STUNTING KOMITMEN DAN AKSI BERSAMA
UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA
JAKARTA, 14 – 15 DESEMBER 2021

Disampaikan oleh:
Dr. Sugeng Hariyono
Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

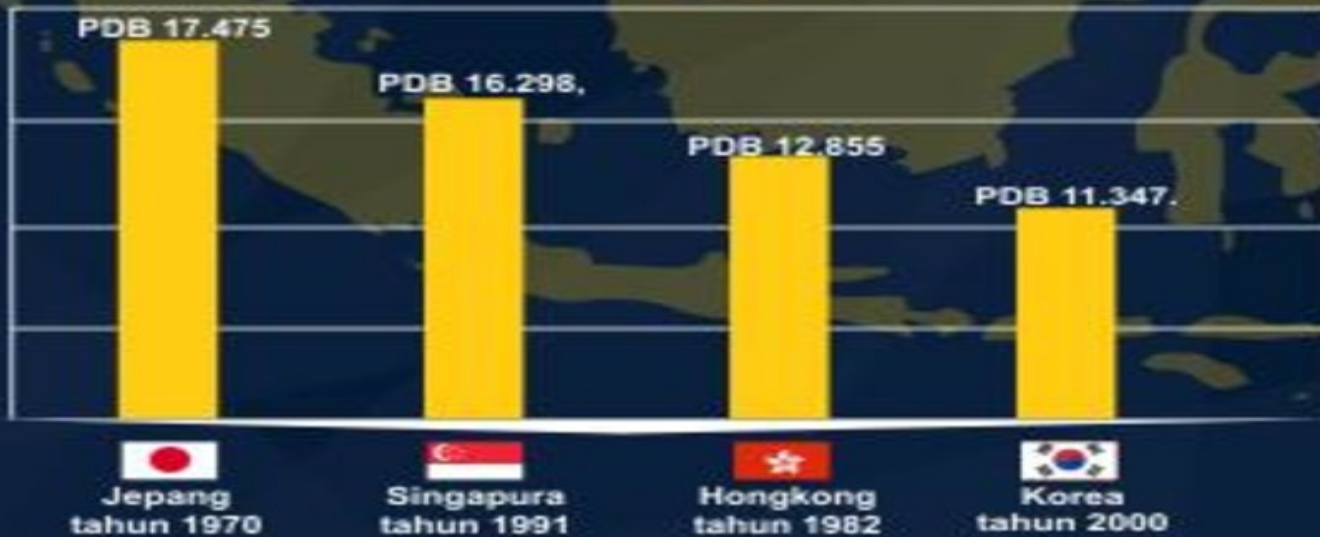


LATAR BELAKANG

- ☒ Peran sumber daya manusia sangat penting didalam masa pembangunan untuk itu kita harus mempunyai sumber daya yang unggul dan berkualitas untuk dapat meraih kemajuan bangsa;
- ☒ Isu stunting terkait dengan bonus demografi, apabila gagal akan menjadi beban negara dan apabila kita berhasil maka kita akan menjadi negara unggul seperti jepang, korea, singapura;
- ☒ Untuk bisa mencapai SDM yang unggul diperlukan komitmen kepala daerah dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana di amanahkan dalam perpres 72/2021 yaitu mencapai 14% pada tahun 2024.

BONUS DEMOGRAFI

negara yang mengoptimalkan bonus demografi



**Bagaimana dengan
Indonesia?**

Jika pertumbuhan kita 6% maka tahun 2030 kita akan mencapai PDB 3.583, namun jika pertumbuhan kita 10% kita akan mencapai PDB 7.243.

BONUS DEMOGRAFI AKAN MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA NASIONAL

1

Meningkatnya kemandirian dan kemampuan bangsa dalam pembangunan nasional;

2

Kemampuan produksi barang dan jasa untuk mendapatkan pendapatan meningkat;

3

Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai pemerataan dan kesenjangan antar daerah;

4

Partisipasi angkatan kerja meningkat yang berdampak kepada berkurangnya pengangguran dan kemiskinan ekstrim berkurang;

5

Mendukung Produktivitas yang meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat;

6

Sehingga, pengangguran adalah dampak yang harus ditekan akibat dari peristiwa bonus demografi;

DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

- 1 **Permendagri 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;**
- 2 **Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**
 - **Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**
- 3 **Permendagri 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2022;**
- 4 **Permendagri 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;**

PELAYANAN DASAR SPM YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENURUNAN STUNTING, AKI DAN AKB

SPM Bidang Pekerjaan Umum

○ KABUPATEN/KOTA

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

SPM Bidang Pendidikan

KABUPATEN/KOTA

- Pendidikan anak usia dini

SPM Bidang Kesehatan

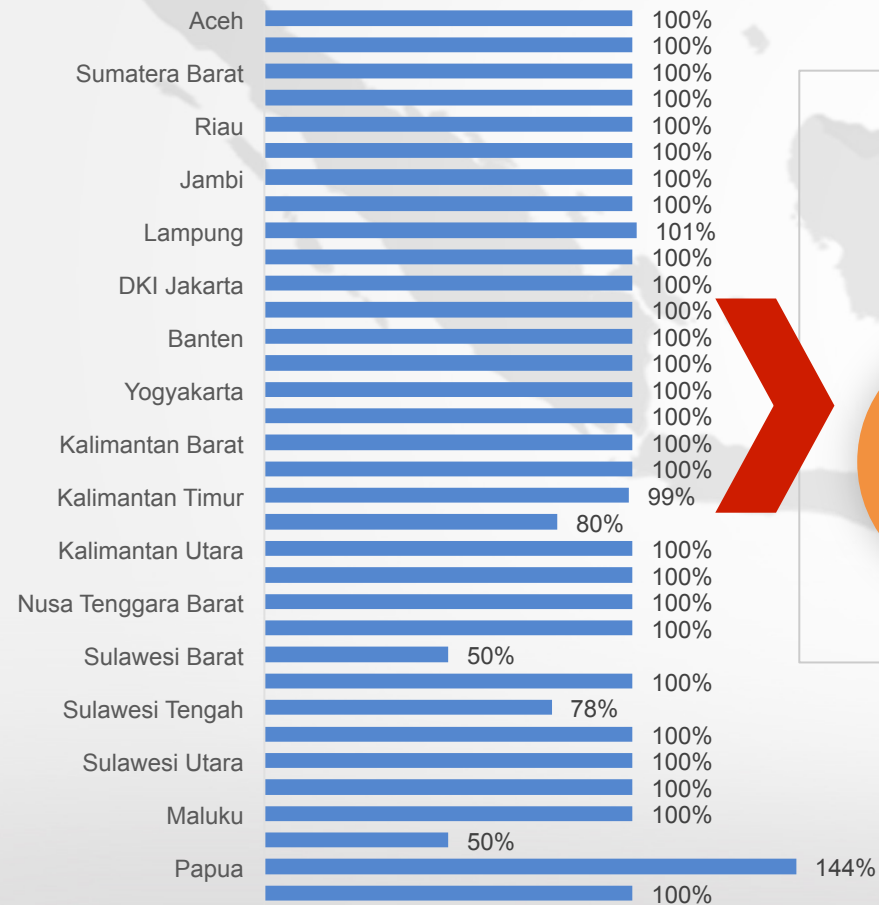
KABUPATEN/KOTA

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

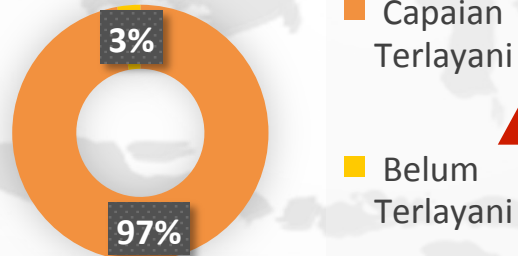
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (1): “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.

CAPAIAN LAYANAN SPM KESEHATAN PROVINSI TAHUN 2020

Capaian Layanan SPM Kesehatan Provinsi



Rata-Rata Capaian Layanan SPM Kesehatan Provinsi



Rata-Rata Capaian PM Kesehatan Provinsi Per Indikator

Yankes Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau

99.80%

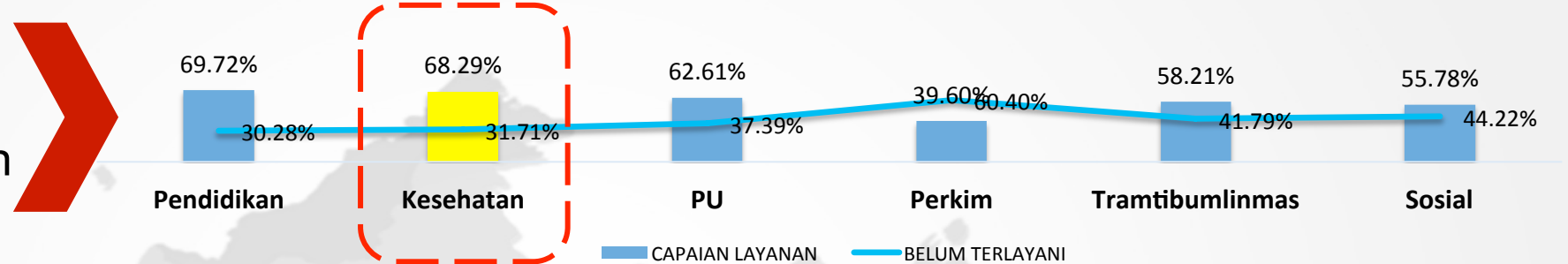
Yankes Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa

94.43%

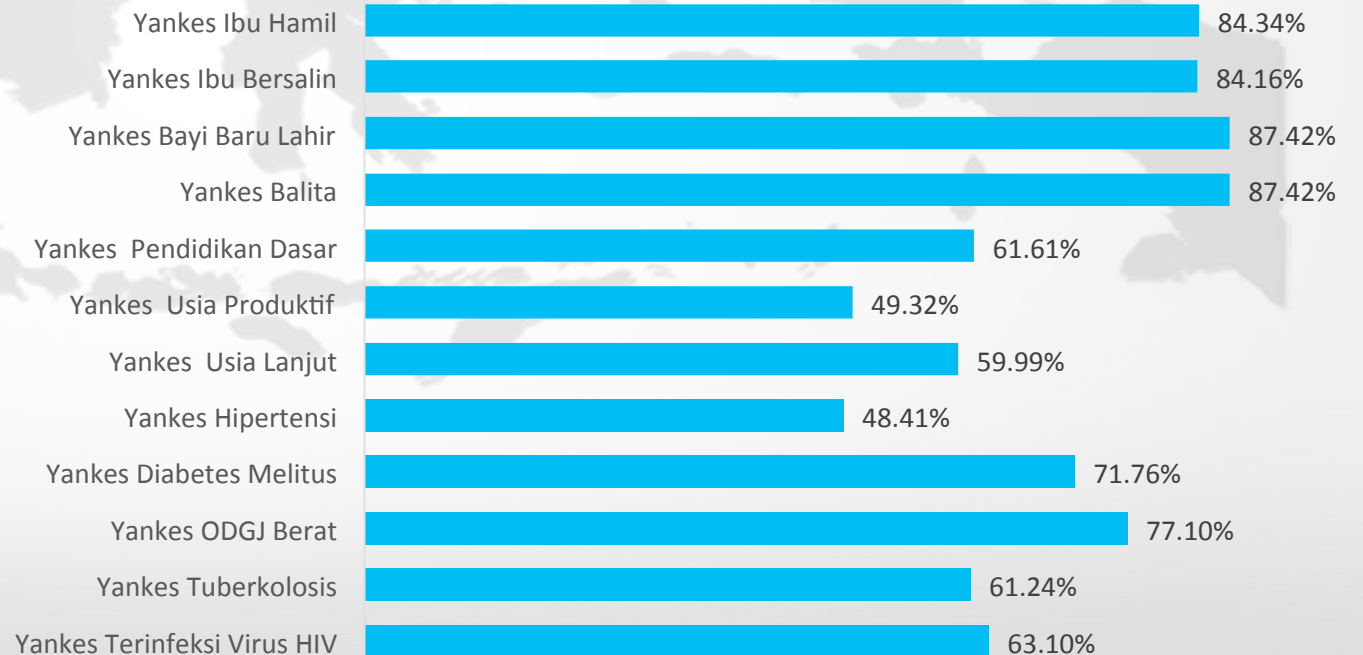


PERBANDINGAN CAPAIAN LAYANAN SPM KABUPATEN SELURUH BIDANG TAHUN 2020

Capaian Layanan
SPM Kabupaten
Seluruh Bidang Tahun
2020



Rata-Rata Capaian PM Kesehatan Kabupaten Per Indikator

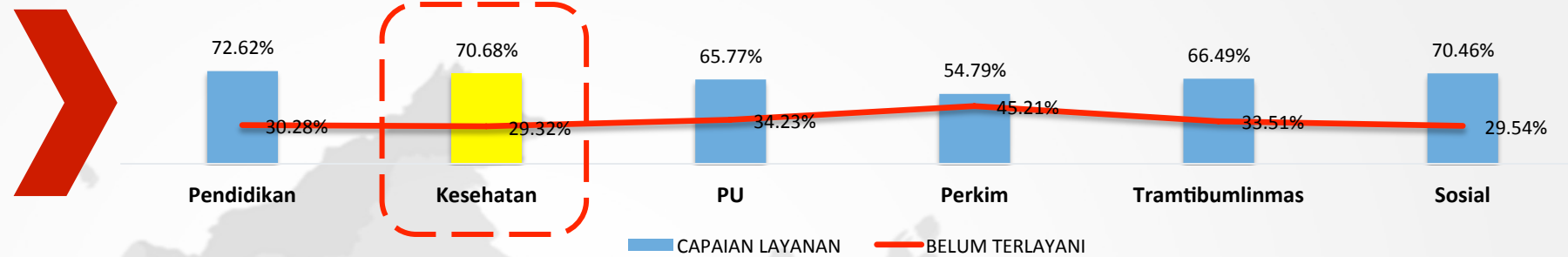


Rata-Rata Capaian Layanan SPM Kesehatan Kabupaten

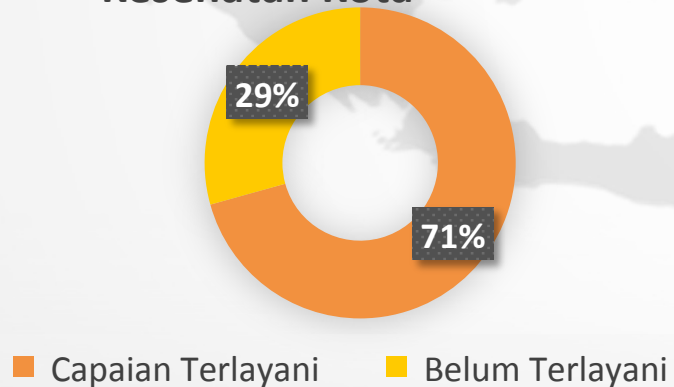


PERBANDINGAN CAPAIAN LAYANAN SPM KOTA SELURUH BIDANG TAHUN 2020

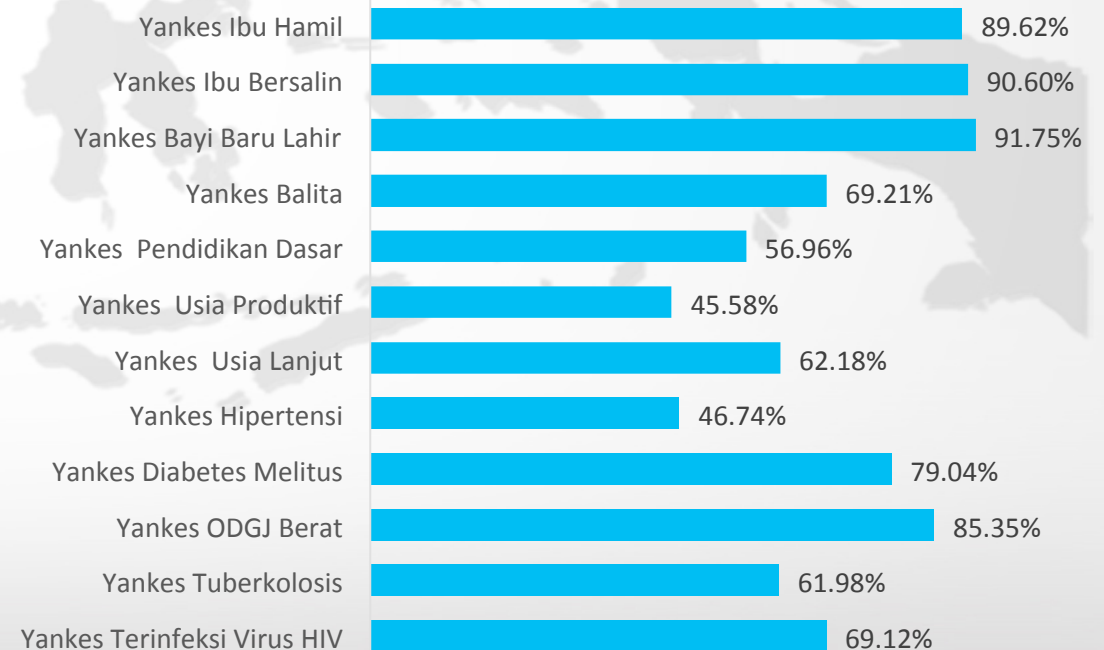
Capaian Layanan
SPM Kota Seluruh
Bidang Tahun 2020



Rata-Rata Capaian Layanan SPM Kesehatan Kota



Rata-Rata Capaian PM Kesehatan Kota Per Indikator



PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING

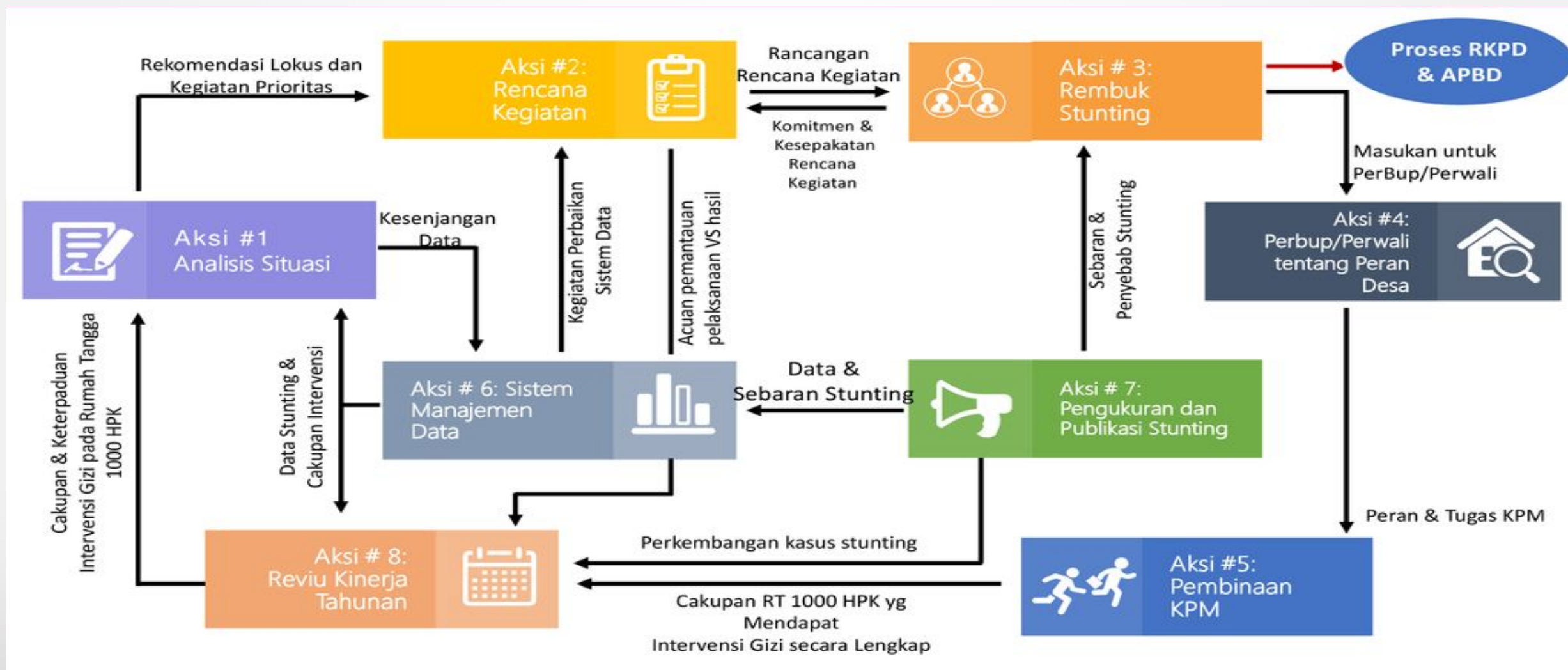


Stunting : Sinyal bahwa ada masalah **dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar**, sehingga pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai, serta tidak **sampai secara lengkap** pada kelompok sasaran prioritas, yaitu Remaja, Calon Pengantin, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Anak usia 0 – 59 Bulan.

Kemendagri memberikan **capacity building** kepada pemerintah provinsi untuk bisa membina dan mengawasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi

Delapan Aksi Konvergensi : Instrument dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar **agar lebih terpadu dan tepat sasaran**

KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARA AKSI KONVERGENSI





MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2020 DAN 2021

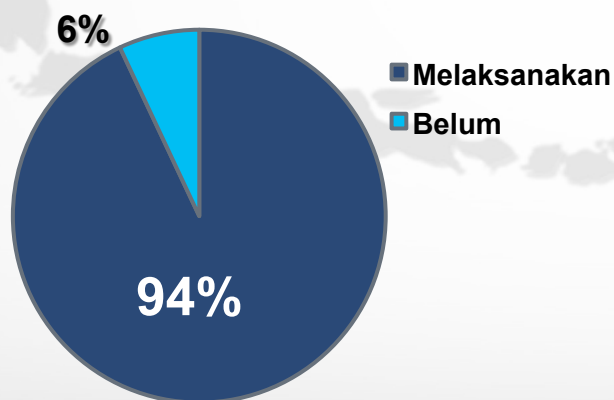
MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2020

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
95,38%	95,38%	95,38%	93,46%	90%	94,62%	92,31%	94,62%

MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2021

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
93,19%	78,26%	76,11%	81,94%	75%	66,92%	15,98%	0%

PRESENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021



PADA TAHUN 2020 DARI 260 KAB/KOTA INTERVENSI TERDAPAT 248 KAB/KOTA (95,38%) YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI, SEDANGKAN UNTUK PADA TAHUN 2021 DARI 360 KABUPATEN/KOTA INTERVENSI 323 KAB/KOTA DI 31 PROVINSI (94%) TELAH MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.



BEST PRACTICE **(PRAKTIK BAIK)**

INOVASI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING **KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



BUKU PRAKTIK BAIK UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GERAKAN SWASEMBADA GIZI

Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Dengan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemenuhan Gizi Secara Mandiri Dan Berkelanjutan

PRAKTIK BAIK UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



TIM PENGENDALI DAN SEKRETARIAT SWASEMBADA GIZI

Tim dan Sekretariat Swasembada Gizi adalah wadah yang dibentuk untuk melakukan koordinasi, konsolidasi dan monitoring penyelenggaraan Gerakan Swasembada Gizi di tingkat kabupaten dengan tujuan memastikan target capaian Kabupaten Lampung Selatan dalam penanganan Stunting terwujud



GERTAK TAYUR (GERAKAN SERENTAK TANAM SAYUR)

Gerakan Serentak Tanam Sayur diresmikan oleh Bupati Lampung Selatan, bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi mandiri keluarga dengan pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Gerakan ini dilaksanakan di semua kecamatan dan desa di Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan TP PKK dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.



UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID 19 UNTUK IBU HAMIL, NIFAS, MELAHIRKAN DAN BALITA

Salah satu upaya khusus untuk memastikan kesehatan ibu hamil, nifas dan balita, serta ibu melahirkan di Kabupaten Lampung Selatan, saat ini Kabupaten Lampung Selatan mengembangkan unit khusus layanan untuk ibu hamil, nifas, ibu melahirkan dan balita yang terpapar covid 19.



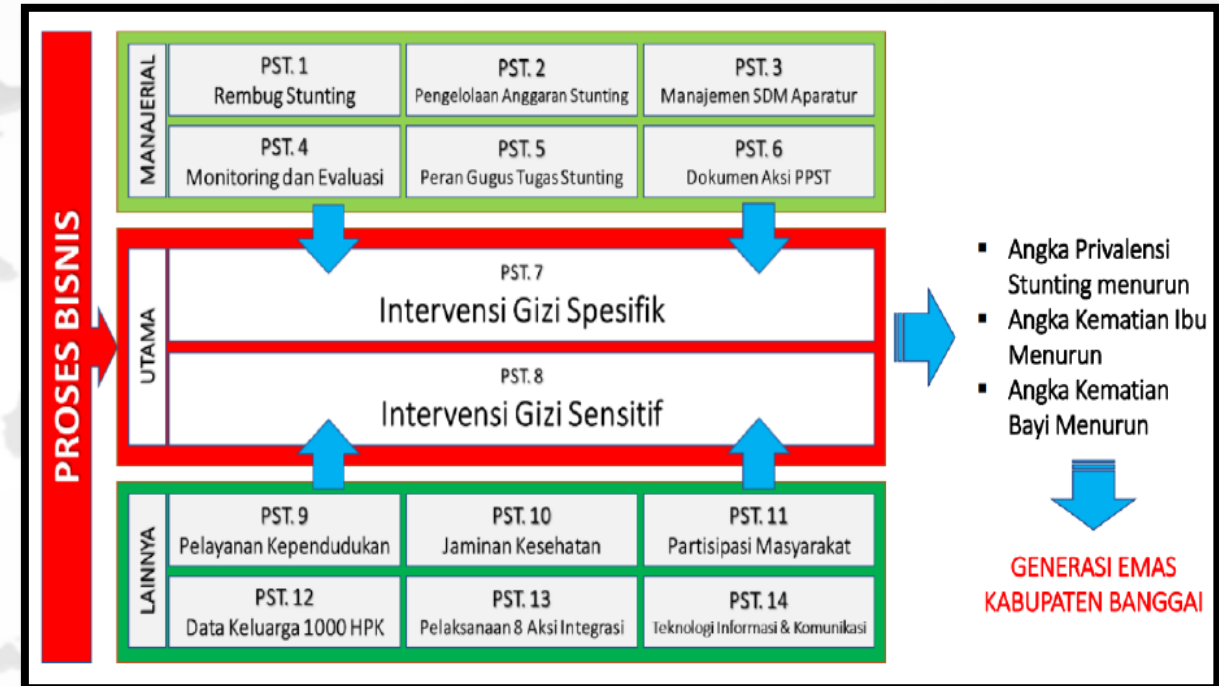
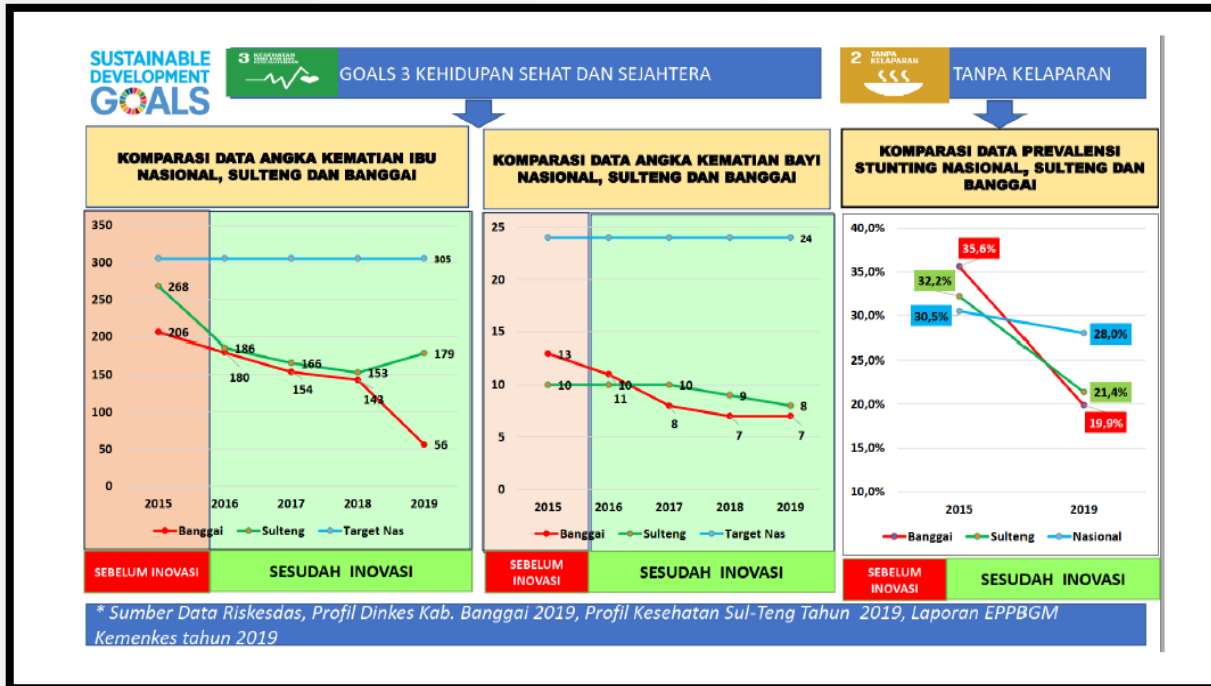
MAKANAN ANJURAN PENAMBAH GIZI BALITA (OFFICIAL MAKANAN PERCEPATAN GIZI BALITA GERAKAN SWASEMBADA GIZI)

Gerakan Swasembada Gizi yang bertujuan meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil memiliki makanan khusus yang dianjurkan dalam rangka percepatan perubahan kondisi gizi masyarakat, yaitu makanan olahan tanaman Kelor. Kegiatan ini bekerjasama dengan UMKM Lamban Kelor melalui pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Korperasi.

INOVASI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING **KABUPATEN BANGGAI**

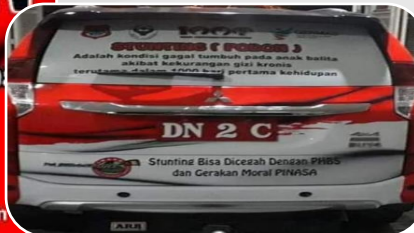


HASIL INTERVENSI STUNTING KABUPATEN BANGGAI



Hasil intervensi 8 Langkah strategis penurunan stunting (Mompotau Stunting) telah berdampak pada penurunan stunting

MELAKUKAN KAMPANYE MASAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING



- Guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan terkait, di lakukan KAMPANYE Cegah Stunting secara terstruktur, massif dan sistematis di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
- Kampanye Cegah Stunting di lakukan dalam bentuk sosialisasi, kegiatan interaktif, brosur, leaflet dan yang sangat efektif yaitu dengan membranding mobil jabatan milik Bupati, Wakil Bupati, Sekab dan kendaraan dinas Kepala PD, Camat serta Kepala BUMN/BUMD.



TERIMA KASIH